**ABSTRAK**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PERKAWINAN CAMPURAN DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO. 35 TAHUN 2014”**

**Oleh:**

**RIZKI ISKANDAR**

**NPM: 175114093**

Perkawinan merupakan sesuatu yang banyak di inginkan oleh manusia dengan harapan mendapatkan keturunan dan hidup bahagia. Saat ini perkawinan tidaklah terkendala oleh jarak, dikarenakan kemajuan teknologi yang begitu cepat sehigga memungkinkan orang untuk bertemu dan menikah dengan orang yang berbeda kewarganegaraannya. Perkawinan yang berbeda kewarganegaraannya disebut dengan perkawinan campur, dari suatu perkawinan tidaklah selalu berjalan mulus baik itu perkawinan antara masyarakat lokal maupun masyarakat yang meakukan perkawinan campur, sehingga perceraian bisa saja terjadi kapan saja dan dari perceraian itu akan menimbulkan masalah-masalah baru contonya mengenai hak asuh anak dari perkawinan itu seperti pada putusan Mahkamah Agung No 804 K/Pdt/2016. Pada perceraian perkawinan campur akan terjadi pemilihan hukum negara para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisa perkara tersebut dari sudut pandang hukum indonesia khususnya Undang-undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan. data yang digunakan adalah data primer, data skunder dan data tersier. Sifat penilitian yang digunakan adalah deskriptif analisis

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, sebagai analisa dalam putusan No 804 K/Pdt/2016 hukum yang digunakan hukum adalah hukum indonesia dengan pemilihan hukum *Lex Fori*. Dalam syarat pemegang hak asuh anak sesuai Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa yang berhak menjadi kuasa asuh adalah kedua orang tua, namun dipilih yang lebih layak oleh pengadilan. Adapun dalam putusan No.804 K/Pdt/2016 hak asuh anak diserahkan kepada pihak penggugat (ayah dari anak) karena pihak tergugat pernah menelantarkan anak tersebut.

**Kata Kunci: Analisis Perlindungan Hukum, Perkawinan Campuran**

**ABSTRACT**

**ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION AGAINST CHILDREN IN MIXED MARRIAGE AND THE RELATIONSHIP WITH CHILD PROTECTION LAW NO. 35 YEAR 2014**

**Oleh:**

**RIZKI ISKANDAR**

**NPM: 175114093**

Marriage is something that many people want in the hope of getting offspring and living a happy life. Currently, marriage is not constrained by distance, because technological advances are so fast that it allows people to meet and marry people of different nationalities. Marriages with different nationalities are called mixed marriages, from a marriage that does not always run smoothly, whether it is a marriage between local communities or people who carry out mixed marriages, so that divorce can happen at any time and from divorce it will cause new problems, for example regarding custody rights. children of the marriage as stated in the Supreme Court's decision No. 804 K/Pdt/2016. In mixed marriage divorce, there will be an election of the state law of the parties to resolve the case, therefore the author is interested in analyzing the case from the point of view of Indonesian law, especially Law 35 of 2014 concerning child protection.

The type of legal research used is empirical juridical, namely a research method that examines document studies. The location of the research was conducted at the Medan District Court. The data used are primary data, secondary data and tertiary data. The nature of the research used is descriptive analysis.

Based on the results of the discussion carried out, as an analysis in decision No. 804 K/Pdt/2016 the law used is Indonesian law with the election of Lex Fori law. In terms of child custody holders according to Law No. 35 of 2014 concerning child protection, both parents have the right to be guardians, but the court chooses the more appropriate one. As for the decision No.804 K/Pdt/2016 child custody rights were handed over to the plaintiff (the father of the child) because the defendant had abandoned the child.

***Keywords: Analysis of Legal Protection, Mixed Marriage***